

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa. Menyadari akan hal ini, pemerintah melakukan perubahan dan penyempurnaan pengelolaan pendidikan yang salah satunya dikenal dengan istilah komite sekolah.

Dinas Pendidikan (2002:45) mengisyaratkan bahwa implementasi akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sifatnya internal di lingkungan sekolah, ataupun faktor eksternal di luar sekolah, yaitu : (1) dan manajemen sekolah yang baik, (2) kondisi sosial, ekonomi, dan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan, (3) dukungan pemerintah, dan (4) profesionalisme.

Rivai (2009 : 148), mengemukakan bahwa dalam mengimplementasikan konsep komite sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dirinya berkaitan dengan permasalahan administrasi, keuangan dan fungsi setiap personel sekolah di dalam kerangka arah dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Komite sekolah harus tampil sebagai motivator dari sejumlah orang yang mewakili berbagai kelompok yang berbeda di dalam masyarakat sekolah dan secara personal harus terlibat dalam setiap proses pembahan di sekolah melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan mutu total dengan menciptakan kompetisi dan penghargaan baik di

dalam komite sekolah itu sendiri maupun dengan komite sekolah lain. Dengan demikian komite mengharuskan masyarakat untuk berperan aktif dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyelaraskan segala sumber daya pendidikan yang tersedia. Komite sekolah harus memiliki visi dan misi kelembagaan serta semangat untuk maju dan mengabdikan dalam mencapai tujuan dan program-program pendidikan yang telah ditetapkan.

Faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan program sekolah adalah partisipasi warga masyarakat melalui wadah Komite Sekolah. Dalam hal ini, Satori dan Fattah (2001 : 99), menyatakan "Sekolah perlu memberdayakan masyarakat melalui Komite Sekolah dengan mengajak bekerja sama dalam memanfaatkan potensi yang ada sehingga semua sumber daya berkembang secara maksimal sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Kebersamaan merupakan potensi yang amat vital untuk membangun masyarakat menciptakan demokratisasi pendidikan".

Komite sekolah diharapkan dapat mendorong terciptanya peningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dengan muaranya pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan pada tataran yang paling bawah yaitu sekolah. Oleh sebab itu, penerapan komite sekolah merupakan model implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan yang dapat dianalisis dan dipahami melalui apa yang senyatanya terjadi sesudah program atau kebijakan dirumuskan dan dinyatakan berlaku.

Penyelenggaraan pendidikan menjadi tugas bersama antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Paradigma sosiologis menganggap bahwa sekolah

sebagai sistem sosial, karena sekolah ada karena ada masyarakat. Baik buruknya sekolah tergantung dari masyarakat bahkan sekolah menjadi cermin masyarakat. Jika masyarakatnya sakit maka lembaga sekolahnya juga sakit.

Masyarakat dapat menjalankan berbagai peran dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan baik melalui peran perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, maupun organisasi kemasyarakatan. Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Masyarakat juga memiliki peran dalam peningkatan mutu pendidikan, yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan monitoring program pendidikan melalui dewan sekolah dan komite sekolah.

Keberadaan komite sekolah sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 dibentuk dalam rangka untuk mewadahi aspirasi masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, dan menciptakan suasana demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan itu merupakan konsekuensi dari upaya meletakkan landasan yang kuat bagi terselenggaranya pendidikan yang lebih demokratis, transparan, dan efisien dengan pelibatan partisipasi masyarakat. Peran komite sekolah mengarah pada empat peran utama komite sekolah, yaitu sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator.

Peran komite sekolah juga merupakan bagian dari jaminan pelibatan *stakeholders* pendidikan dalam mendukung proses pendidikan secara lebih luas. merupakan pola manajemen baru yang bertujuan untuk memberdayakan sekolah

melalui pemberian kewenangan yang lebih besar kepada sekolah (pengelola sekolah) untuk mengelola sekolah tersebut dalam rangka untuk meningkatkan mutu sekolahnya. Salah satu indikator keberhasilan sekolah dalam mengimplementasikan komite dapat diidentifikasi: (1) adanya peningkatan otonomi atau kemandirian sekolah dalam mengelola sekolahnya; (2) adanya perubahan dalam sistem pengambilan keputusan ke arah pengambilan keputusan secara partisipatif, yang melibatkan semua komponen sekolah; (3) adanya peningkatan peran serta orangtua siswa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan (4) adanya upaya dalam perbaikan praktik pembelajaran, menuju pembelajaran yang efektif dalam rangka untuk meningkatkan mutu sekolah. Dengan demikian, keterlibatan orangtua siswa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi dalam rangka mewujudkan kemandirian sekolah. Komite sekolah diharapkan menjadi mitra satuan pendidikan yang dapat menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan.

Selama ini di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Parungi telah diupayakan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, namun keterlibatan tersebut masih sebatas dalam bentuk dukungan pikiran untuk penyelenggaraan pendidikan atau sekedar untuk membantu serta menyediakan fasilitas belajar anak di rumah. Sementara itu, keterlibatan orangtua siswa dalam pengambilan keputusan tentang program-program sekolah, proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah, evaluasi dan akuntabilitas program belum dapat terealisasikan. Oleh karena itu, upaya peningkatan

keterlibatan orangtua siswa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan seperti yang diidealkan oleh konsep komite nampaknya merupakan upaya yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan direalisasikan secara bertahap.

Masih rendahnya kesadaran orangtua dan masyarakat mengenai arti penting keterlibatan mereka dalam pendidikan anak, rendahnya tingkat pendidikan orangtua, faktor budaya dan sikap orangtua yang cenderung mempercayakan sepenuhnya pendidikan anaknya kepada sekolah, diduga akan menjadi pengaruh utama dalam upaya partisipasi masyarakat dalam pendidikan anaknya di sekolah.

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Parungi adalah Madrasah Ibtidaiyah di Desa Parungi Kecamatan Boliyohuto, madrasah ini sejak mulai diresmikan pendiriannya sampai saat ini telah mengalami perkembangan yang pesat baik dilihat dari bangunan fisiknya, pemenuhan sarana prasarana yang ada serta prestasi yang diperoleh. Perkembangan dan prestasi yang diraih ini ternyata tidak terlepas dari peranan komite sekolah. Komite Madrasah Ibtidaiyah Negeri Parungi telah berhasil memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan yang telah diraih oleh sekolah tersebut. Salah satunya adalah peranannya dalam pembiayaan pendidikan. Kinerja yang baik dari komite telah menghantarkannya menjadi pusat pelaksanaan Ujian Nasional Madrasah Ibtidaiyah dari beberapa Madrasa dari beberapa kecamatan. Erat kaitannya dengan juga menyangkut peranan kepala sekolah, kewenangan yang diberikan kepada sekolah mengakibatkan kepala sekolah memiliki peranan yang krusial dan kuat dalam kebijakan pendidikan di sekolah. Dengan adanya komite sekolah pengelolaan pendidikan di sekolah diharapkan bisa transparan, efektif, dan efisien. Selain itu efek

akuntabilitas dan rentang pengawasan semakin pendek, pihak masyarakat juga dapat berpartisipasi langsung dalam pengambilan kebijakan. Namun demikian, realita di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Parungi peranan komite sekolah tersebut belum seperti yang diharapkan. Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk dapat mengkaji lebih dalam mengenai **“Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Parungi”**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Peran Komite sekolah sebagai badan pertimbangan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Parungi
2. Peran komite sekolah sebagai badan pendukung di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Parungi
3. Peran komite sekolah sebagai pengontrol di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Parungi
4. Peran komite sekolah sebagai mediator di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Parungi

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Parungi
2. Untuk mengetahui peran komite sekolah sebagai badan pendukung di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Parungi

3. Untuk mengetahui peran komite sekolah sebagai pengontrol di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Parungi
4. Untuk mengetahui peran komite sekolah sebagai mediator di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Parungi

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### a. Bagi Sekolah

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi sekolah yang berupa informasi-informasi tentang peran komite dan partisipasi masyarakat di lingkungan sekolah dan upaya peningkatan kinerja komite sekolah.

##### b. Bagi Komite

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu kepada komite di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Parungi yang berkaitan dengan peran komite sekolah dan partisipasi masyarakat.

##### c. Bagi peneliti

Untuk pengembangan ilmu, terutama bagi peneliti sendiri dan terbuka bagi peneliti lain dalam mengembangkan dan mendalami tentang peran komite sekolah dalam peningkatan partisipasi masyarakat.